

Faktor-faktor penentu Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020

AKURASI
428

Kumba Digdowiseiso¹, Novia Nur Damayanti²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional
Jakarta, Indonesia

Research Paper
Financial Management

Abstract

This research aims to determine the effect of the regional independence ratio, capital expenditure ratio, and poverty on the Human Development Index in the Regency and City of West Java Province for the 2016 – 2020. The method of analytic was used panel data regression with used a model or Fixed Effect Modal (FEM). The level of significance in this research is 5 or 0.05. The results of this research is indicate that the regional independence ratio variable has a positive and insignificant effect on the Human Development Index variable. The capital expenditure ratio variable has a negative and insignificant effect on the Human Development Index variable. Meanwhile, the poverty variable has a negative and significant effect on The Human Development Index variable.

Received: 10 Nov 2021
Accepted: 23 Dec 2021
Online: 30 Dec 2021



Akurasi: Jurnal Riset
Akuntansi dan Keuangan,
Vol 3, No.3, 2021,
pp. 183 - 196

Keywords:

Regional Independence Ratio, Capital Expenditure Ratio, Poverty, and Human Development Index.

Corresponding Author:

Kumba Digdowiseiso
Universitas Nasional
kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

eISSN 2685-2888

DOI: <https://doi.org/10.36407/akurasi.v3i3.428>



© The Author(s) 2021

CC BY This license allows reusers to distribute, remix, adapt, and build upon the material in any medium or format, so long as attribution is given to the creator. The license allows for commercial use.

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indeks ataupun indikator untuk menentukan keberhasilan suatu pembangunan ekonomi di suatu daerah dikatakan berhasil ataukah tidak. Seperti halnya indeks pertumbuhan pendapatan per kapita. Tetapi IPM lebih menekankan kepada manusianya. Pembangunan yang tidak hanya melihat dari sisi ekonomi tetapi ekonomi yang diterapkan ke dalam faktor manusianya. IPM menekankan kepada bagaimana dengan ekonomi yang baik masyarakat memiliki pilihan yang lebih luas yang bebas dan bermartabat dalam memenuhi kehidupannya. Menurut BPS (2021) terdapat tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak inilah yang membentuk indeks pembangunan manusia. Yang mana hal ini semua ditentukan oleh beberapa faktor antara lain kemandirian keuangan daerah, rasio belanja modal dan tentunya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Dari data yang diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Manusia terendah berada di Kabupaten Cianjur pada tahun 2016 sebesar 62.92%. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia tertinggi berada di Kota Bekasi pada tahun 2019 sebesar 81.95%.

Pemerintah daerah memiliki suatu tantangan yang harus dijalankan untuk membangun dan mengelola daerahnya dengan baik. Apabila kemandirian keuangan daerah mengalami peningkatan, maka pemerintah daerah mampu membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Tentunya hal ini akan meningkatkan kemakmuran daerah dan peningkatan kemakmuran untuk masyarakat di daerah tersebut. Dengan peningkatan kemandirian keuangan maka akan meningkatkan pelayanan daerah yang dilanjutkan dengan peningkatan standar hidup yang layak. Dari data yang diperoleh melalui *website* DJPK Kemenkeu, Rasio Kemandirian Daerah terendah berada di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016 sebesar 6.52%. Sedangkan Rasio Kemandirian Daerah tertinggi berada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017 sebesar 46.31%.

Alokasi belanja modal merupakan modal publik dari suatu negara. Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan oleh pemerintah yang mana dapat memperoleh suatu aktiva tetap, seperti peralatan, bangunan, infrastruktur, dan yang lainnya. Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah akan tercapai apabila alokasi belanja modal dapat digunakan dengan baik. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari data yang diperoleh melalui *website* DJPK Kemenkeu, Rasio Belanja Modal terendah berada di Kota Sukabumi pada tahun 2018 sebesar 3.66%. Sedangkan Rasio Belanja Modal tertinggi berada di Kota Cimahi pada tahun 2016 sebesar 73.74%.

BPS Provinsi Jawa Barat, tahun 2021 mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup lebih layak. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia. Hingga saat ini pemerintah Indonesia banyak memiliki program untuk mengatasi kemiskinan yang ada. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat rumit dan bersifat multidimensional sehingga menjadi hal yang penting untuk pembangunan. Upaya untuk mengatasi kemiskinan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Dari data yang diperoleh melalui *website* Badan Pusat Statistik, Persentase Penduduk Miskin terendah berada di Kota Depok pada tahun 2019 sebesar 2.07%. Sedangkan Persentase Penduduk Miskin tertinggi berada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2016 sebesar 15.60%.

Beberapa studi terdahulu mencoba menginvestigasi hubungan antara rasio kemandirian daerah, rasio belanja modal, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dan

beberapa studi telah mengungkapkan bahwa rasio kemandirian memang berpengaruh terhadap IPM (Hendri dan Yafiza, 2020; Mauludin dan Dewi, 2020). Mauludin & Dewi (2020) mencoba untuk mengetahui pengaruh rasio kemandirian keuangan daerah, dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten periode 2013 – 2017. Hasil penelitian mereka membuktikan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap IPM Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Sementara itu, penelitian Wardani (2018) menguji dengan tiga variabel bebas yang memprediksi terhadap indeks pembangunan manusia. Tiga variabel bebas yang diuji tersebut adalah pengaruh aset daerah (PAD), dana perimbangan, dan belanja modal. Yang mana penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah baik tingkata Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dengan data tahun 2014 – 2016. Hasil dari penelitian mengindikasikan bahwa hanya satu variabel yang mempengaruhi IPM yaitu variabel PAD. Sedangkan kedua variabel lain yaitu dana perimbangan dan belanja modal tidak signifikan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Sedangkan penelitian yang menghubungkan kemiskinan dengan IPM telah dilakukan oleh Fitri (2021), menyelidiki kemiskinan dengan dua variabel bebas lainnya yaitu pertumbuhan ekonomi dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di periode 2015 – 2019. Hasil penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan mempengaruhi secara signifikan indeks pembangunan manusia meskipun dengan arah yang negatif.

TINJAUAN PUSTAKA

Manajemen Keuangan Publik

Keuangan negara atau keuangan publik merupakan semua baik barang ataupun uang yang merupakan hak dan kewajiban negara yang menjadi milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban seperti pada UU17/2003 (UU 17/2003). Tiga (3) bidang utama yang ada di dalam ruang lingkup Keuangan Publik adalah (Digdowiseiso, 2015) : “(1) Permasalahan keuangan pemerintah itu sendiri, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada, (2) Segala kegiatan yang berhubungan dengan alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan aspek stabilisasi, (3) Analisis hubungan sektor publik dan sektor swasta.”

Agency Theory

Menurut penelitian yang diteliti oleh Arwani et al. (2020) suatu perusahaan dapat dilihat sebagai hubungan kontrak antara pemegang sumber daya yang disebut *agency theory*. Hubungan *agency* timbul ketika pelaku (*principal*) mempekerjakan seseorang (*agent*) untuk melakukan hal tertentu agar dapat mengambil suatu keputusan. Hubungan utama *agency* tidak selalu baik, karena *agency theory* berkaitan dengan konflik *agency*.

Hubungan keagenan dalam akuntansi sektor publik antara lain yaitu masyarakat dengan legislatif, legislatif dengan pemerintah, menteri keuangan dengan pengguna anggaran, perdana menteri dengan birokrat, dan pejabat dengan pemberi layanan. Masalah yang sering timbul dalam *agency problem* karena adanya *asymmetric information*, yaitu ketidaksinambungan informasi yang di dapat antara *principal* dan *agent*. Komite audit bertugas agar tidak ada kecurangan dan memberikan informasi yang diperoleh dari *principal* dan *agent*, sehingga keputusan manajemen puncak bersifat adil bagi kepentingan *principal* dan *agent* dan juga untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Teori Anggaran Sektor Publik

Menurut Digdowiseiso (2015) anggaran adalah suatu rencana keuangan yang memperkirakan dan menjadi pijakan dasar pemikiran masa depan apa saja yang harus dilakukan. “Setiap anggaran belanja menguraikan berbagai fakta yang khusus (spesifik) tentang apa-apa yang direncanakan untuk dilakukan oleh unit organisasi yang menyusun anggaran belanja tersebut pada periode waktu yang akan datang”. Ada beberapa fungsi anggaran diantaranya adalah sebagai berikut (Digdowiseiso, 2015) : Fungsi Alokasi yaitu tujuan dari fungsi alokasi adalah untuk meningkatkan pelayanan pemerintah perlu diikuti dengan kenaikan pajak. Kedua, Fungsi Distribusi. Tujuan dari fungsi distribusi adalah distribusi pendapatan ke kelompok rendah/tinggi perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya. Fungsi Stabilisasi, tujuan dari fungsi stabilisasi adalah kebijakan yang lebih ekspansif diperlukan dengan menaikkan pengeluaran publik atau dengan menurunkan pajak.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Peran penting yang dimiliki oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pembangunan ekonomi, karena jika pembangunan ekonomi di suatu daerah baik maka sumber daya manusia akan memiliki kualitas yang baik pula, sehingga bisa memaksimalkan faktor-faktor produksi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia bisa menjadi tolak ukur untuk investor dalam menanamkan modalnya ke wilayah atau daerah tersebut (Dewi, 2019). Status dalam pembangunan manusia dibagi menjadi empat (4) kategori diantaranya yaitu (BPS) :

$IPM < 60$	: Rendah
$60 \leq IPM < 70$	: Sedang
$70 \leq IPM < 80$	: Tinggi
$IPM \geq 80$	: Sangat Tinggi

Rasio Kemandirian Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil pencapaian di bidang keuangan daerah yang terdiri dari anggaran dan realisasi PAD menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan melalui kebijakan perundang-undangan dalam satu periode anggaran.

Pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil menjalankan tugasnya apabila kegiatan pemerintahan seperti pembangunan atau pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerahnya dengan baik. Indikator yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerahnya dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan. Mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh Hanif (2019), maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H_1 : Variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Rasio Belanja Modal

Belanja langsung yang bersumber dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai kebutuhan investasi adalah belanja modal. Menurut Dirjen Kemenkeu (2020), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal antara lain meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Capital expenditure ratio adalah rasio belanja modal dibagi dengan total belanja daerah lalu dikalikan dengan 100%. Mengacu pada Penelitian yang dilakukan oleh Tarumingkeng et al. (2021), maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Variabel rasio belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

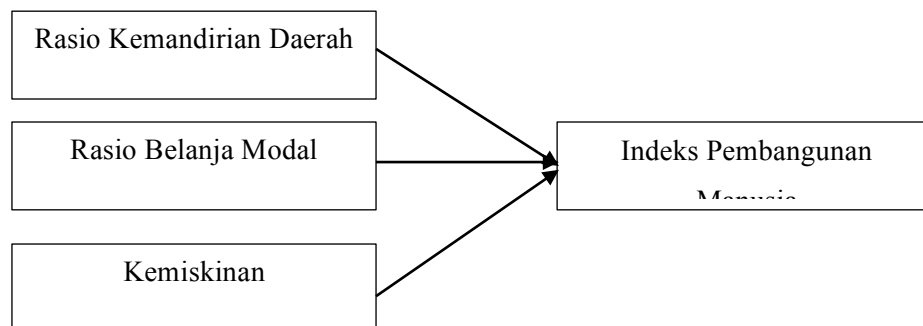
Kemiskinan

Kemiskinan digambarkan apabila kondisi seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. BPS Provinsi Jawa Barat, tahun 2021 menyebutkan bahwa konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang dapat diukur dari sisi pengeluaran.

Negara Indonesia memiliki penduduk terbanyak ke-3 setelah negara China dan Amerika Serikat. Penduduk yang terlalu tinggi dapat menghambat pembangunan ekonomi di suatu negara berkembang. Kemiskinan kronis akan terjadi apabila pertumbuhan penduduk di suatu negara mengalami peningkatan. Seseorang dapat dikatakan miskin jika tingkat pendapatan ataupun standar hidupnya berada dibawah ketetapan garis kemiskinan. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Diba et al. (2018), maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Model Penelitian



Gambar 1. Kerangka Model Penelitian

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, dimana jenis penelitian ini menggunakan data pada tahun sebelumnya untuk menguji hipotesis berdasarkan sampel dan populasi tertentu. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder, dimana jenis data ini sudah diolah terlebih dahulu dan akan digunakan sebagai informasi tambahan untuk peneliti.

Pengukuran

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk melihat kesejahteraan di suatu daerah. *United Nation Development Program* (UNDP) mengatakan bahwa pembangunan manusia merupakan sebuah proses untuk memperluas pilihan masyarakat. Rumus IPM :

$$\frac{1}{3} (In\ Kesehatan \times In\ Pendidikan \times In\ Pengeluaran) \times 100\%$$

Rasio kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan daerahnya seperti kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat yang dimana akan menjadi sumber pendapatan daerahnya. Rumus Rasio Kemandirian :

(Pendapatan Asli Daerah/BPP atau Provinsi dan Pinjaman)

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Rumus Capital Expenditure Ratio :

(Belanja Modal/Total Belanja Daerah) X 100%

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu atau belum ada proses perubahan karena tidak memiliki kemampuan, baik dari segi faktor produksi ataupun kualitas produksi. Kemiskinan dapat terjadi karena kebutuhan yang sulit terpenuhi seperti pendidikan, pekerjaan, kesehatan, pendapatan, dan lain-lain. Rumus Persentase Penduduk Miskin :

$$Pa = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$$

Keterangan :

$a = 0$

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah GK

q = Banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Sampel yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu 27 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Barat, dimana waktu pengamatannya dimulai pada tahun 2016 – 2020. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode dokumentasi yang dimana data dari masing-masing variabel diperoleh dari sumber yang akurat seperti, *website* resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, *website* resmi DJPK Kementerian Keuangan, buku, dan sumber lain yang terpercaya.

Teknik Analisis

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan atau kombinasi antara *cross section* (data silang tempat) pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan *time series* (data runtut waktu) pada tahun 2016-2020. Analisis ini dilakukan melalui program Stata, dimana Stata merupakan program statistik yang dikeluarkan oleh *Stata Corporation*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil olah data diatas dapat diketahui bahwa jumlah observasi yang dilakukan adalah sebanyak 135 observasi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah IPM, yang dimana nilai rata-ratanya adalah 70.84, nilai standar deviasi sebesar 4.84, nilai minimal sebesar 62.92 yang dimana nilai tersebut berada di Kabupaten Cianjur pada tahun 2016, serta nilai maksimal sebesar 81.95 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Bekasi pada tahun 2019.

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Obs	Mean	Std. Deviasi	Min	Max
IPM	135	70.84	4.84	62.92	81.95
Rasio Kemandirian Daerah	135	21.95	11.29	6.52	46.31
Rasio Belanja Modal	135	17.97	7.74	3.66	73.74
Kemiskinan	135	8.49	2.96	2.07	15.6

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 16, 2021

Variabel independen dalam penelitian ini ada tiga, yang pertama adalah Rasio Kemandirian Daerah, yang dimana nilai rata-ratanya adalah 21.95, nilai standar deviasi sebesar 11.29, nilai minimal sebesar 6.52 yang dimana nilai tersebut berada di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016, serta nilai maksimal sebesar 46.31 yang dimana nilai tersebut berada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017.

Variabel independen kedua dalam penelitian ini adalah Rasio Belanja Modal, yang dimana nilai rata-ratanya adalah 17.97, nilai standar deviasi sebesar 7.74, nilai minimal sebesar 3.66 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Sukabumi pada tahun 2018, serta nilai maksimal sebesar 73.74 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Cimahi pada tahun 2017.

Variabel independen ketiga dalam penelitian ini adalah Kemiskinan, yang dimana nilai rata-ratanya adalah 8.49, nilai standar deviasi sebesar 2.96, nilai minimal sebesar 2.07 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Depok pada tahun 2019, serta nilai maksimal sebesar 15.6 yang dimana nilai tersebut berada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2016.

Pemilihan Model Estimasi Data Panel

Terdapat tiga model dalam melakukan pemilihan estimasi data panel diantaranya yaitu *Ordinary Least Square (OLS)*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Tabel 2. Model Estimasi Data Panel

Variabel	OLS	Fixed Effect	Random Effect
Rasio Kemandirian Daerah	0.20	0.02	0.05
Rasio Belanja Modal	0.04	-0.02	-0.02
Kemiskinan	-0.69	-0.74	-0.78
_cons	71.45	77.03	76.73

Sumber : Data diolah menggunakan STATA 16, 2021

Chow Test

Uji ini digunakan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Ordinary Least Square (OLS)* dengan hipotesis H_0 : Model *OLS*, dan H_a : Model *FEM*. Dari hasil Uji *Chow* menunjukkan bahwa nilai Prob F < nilai α , yaitu $0.0000 < 0.05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima apabila *Probability F* < 0,05. Sehingga model yang cocok untuk digunakan yaitu *Fixed Effect Model*.

Hausman Test

Uji ini digunakan untuk membandingkan antara *Fixed Effect Model (FEM)* atau *Random Effect Model (REM)* dengan hipotesis H_0 : Model *REM*, dan H_a : Model *FEM*. Dari hasil Uji *Hausman* menunjukkan bahwa nilai Prob Chi 2 < nilai α , yaitu $0.0007 < 0.05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak H_a diterima apabila *Probability Chi-Square* < 0,05. Sehingga model yang cocok untuk digunakan yaitu *Fixed Effects Model*.

Setelah dilakukan pengujian *Chow Test*, dan *Hausman Test* maka dapat disimpulkan bahwa model estimasi data panel terbaik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Fixed*

Effect Model (FEM). Sehingga peneliti tidak melakukan pengujian *Lagrange Multiple Test*, karena dari hasil *Chow Test*, dan *Hausman Test* sudah ditemukan model estimasi data panel terbaik.

Uji Asumsi Klasik

Tujuan dari uji asumsi klasik adalah untuk memperkuat hasil analisis dari persamaan regresi yang dilakukan untuk menghasilkan parameter yang bersifat *Best Linear Unbias Estimation (BLUE)*, yang dimana nilai estimator menghasilkan nilai harapan sesuai dengan nilai sesungguhnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Shapiro-Wilk test* untuk melakukan uji normalitas. Dari hasil uji normalitas diatas diketahui bahwa nilai Prob $z > \alpha$, yaitu $0.48 > 0.05$. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini terdistribusi secara normal. Untuk melihat apakah ada atau tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari *VIF (Variance Inflation Factor)*. Jika nilai *VIF* kurang dari 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas. Dari hasil uji multikolinearitas diatas diketahui bahwa nilai $VIF < 10$, dan nilai $1/VIF > 0.10$, yaitu nilai *VIF* 4.18. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak ada gejala multikolinearitas. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *wald test* untuk melakukan uji heterokedastisitas. Dari hasil uji heterokedastisitas diatas diketahui bahwa nilai Prob Chi 2 $> \alpha$, yaitu $0.07 > 0.05$. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini tidak memiliki gejala heterokedastisitas.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan *Wooldridge test* untuk melakukan uji autokorelasi. Dari hasil uji autokorelasi diatas diketahui bahwa nilai Prob F $< \alpha$, yaitu $0.0000 < 0.05$. Maka dapat dinyatakan bahwa data penelitian ini memiliki gejala autokorelasi, sehingga perlu dilakukan perbaikan asumsi klasik dengan *General Least Square (GLS)*. Dari hasil uji autokorelasi dengan menggunakan metode *GLS*, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini sudah memenuhi sifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimation)*.

Pengujian Hipotesis

Variabel bebas dapat dikatakan berpengaruh signifikan apabila $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$. Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji t terlihat pada tabel 3.

Tabel 3. Uji t

Variabel	t	P> t
Rasio Kemandirian Daerah	1.23	0.23
Rasio Belanja Modal	-1.92	0.07
Kemiskinan	-16.56	0.00
Probability F	0.00	0.05

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 16, 2021

Model penelitian merupakan model yang baik. Hal ini ditunjukkan dari nilai prob F. Diperoleh nilai Prob $> F$ sebesar 0.00 yang artinya nilai tersebut $< 0,05$. Jadi dapat disimpulkan bahwa, model yang digunakan dalam penelitian ini *fit* dengan data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model *fixed effect* yang dimana nilai *R-square* adalah sebesar 0.67. Artinya adalah kemampuan suatu model dalam menjelaskan Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.67 atau 67%, sedangkan sisanya sebesar 33% dijelaskan oleh variabel lain atau selain variabel yang ada di dalam penelitian ini.

Dari data pada tabel 3 menunjukkan $t\text{-hitung}$ lebih besar daripada $t\text{-tabel}$ yaitu 1.23 lebih besar dari 0.23. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh dan signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Sedangkan perolehan untuk

rasio belanja modal menunjukkan hal yang berbeda yaitu t-hitung lebih kecil dibandingkan t-tabel. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa, variabel rasio belanja modal berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia. Hal yang serupa terjadi pada perolehan hasil t-hitung untuk variabel kemiskinan, t-hitung lebih kecil daripada t-tabel. Nilai t-hitung sebesar -16.56 dan t-tabel sebesar 0.00 yang artinya dapat disimpulkan bahwa, variabel kemiskinan berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel indeks pembangunan manusia.

Analisis Regresi Data Panel

Untuk mengatasi masalah tidak *BLUE* (*Best Linear Unbiased Estimation*), maka dilakukan uji *Robust Standard Error* pada aplikasi STATA 16. Berikut ini hasil estimasi dari persamaan model regresi, yaitu :

Persamaan 1:

$$IPM_1 = 70.69 + 0.007 \text{Rasio Kemandirian Daerah}_i$$

Persamaan 2:

$$IPM_2 = 71.39 - 0.030 \text{Rasio Belanja Modal}_i$$

Persamaan 3:

$$IPM_3 = 77.23 - 0.752 \text{Kemiskinan}_i$$

Persamaan 4:

$$IPM_4 = 77.03 + 0.024 \text{Rasio Kemandirian Daerah}_i - 0.022 \text{Rasio Belanja Modal}_i - 0.744 \text{Kemiskinan}_i$$

Tabel 4. Analisis Regresi Data Panel

Variabel Independent	Variabel Dependent : Indeks Pembangunan Manusia			
	1	2	3	4
Rasio Kemandirian Daerah	0.007*** (0.031)			0.024*** (0.019)
Rasio Belanja Modal		-0.030*** (0.014)		-0.022*** (0.012)
Kemiskinan			-0.752*** (0.045)	-0.744*** (0.045)
_cons	70.69	71.39	77.23	77.03
R-Squared	0.0004	0.0549	0.6306	0.6657
Observasi	135	135	135	135

Sumber: Data diolah menggunakan STATA 16, 2021

Keterangan: (xxx) *Robust Standard Error*. *** p<0.01; ** p<0.05; * p<0.1

Hubungan antara rasio kemandirian daerah, rasio belanja modal, dan kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$IPM_i = 77.03 + 0.024 \text{Rasio Kemandirian Daerah}_i - 0.022 \text{Rasio Belanja Modal}_i - 0.744 \text{Kemiskinan}_i$$

Dari tabel 4, diketahui bahwa variabel rasio kemandirian daerah pada persamaan regresi di kolom 1 dan kolom 4 mengalami peningkatan atau mengalami koefisien positif. Pada kolom 1, hasil persamaan regresi variabel rasio kemandirian daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar 0.007. Sedangkan pada kolom 4, hasil persamaan regresi variabel rasio kemandirian daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar 0.024.

Variabel rasio belanja modal pada persamaan regresi di kolom 2 dan kolom 4 mengalami penurunan atau mengalami koefisien negatif. Pada kolom 2, hasil persamaan regresi variabel rasio belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -0.030. Sedangkan

pada kolom 4, hasil persamaan regresi variabel rasio belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.022.

Variabel kemiskinan pada persamaan regresi di kolom 3 dan kolom 4 mengalami penurunan atau mengalami koefisien negatif. Pada kolom 3, hasil persamaan regresi variabel kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia adalah sebesar -0.752. Sedangkan pada kolom 4, hasil persamaan regresi variabel kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia sebesar -0.744.

Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil dari analisis deskriptif memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 21.95, nilai standar deviasi sebesar 11.29, nilai minimal sebesar 6.52, dan nilai maksimal sebesar 46.31. Nilai minimal berada di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016, dan nilai maksimal berada di Kabupaten Bekasi pada tahun 2017.

Pengaruh rasio kemandirian daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki nilai koefisien sebesar 0.02, dengan *p-value* sebesar 0.23. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan pada taraf 0.05 terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020.

Hasil tersebut membuktikan bahwa, jika rasio kemandirian daerah mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan meningkat sebesar 0.02 dengan asumsi variabel independen yang lain tidak mengalami penurunan atau bersifat konstan. Selain itu, dengan meningkatnya rasio kemandirian daerah di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat akan memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun atau memperbaiki infrastruktur publik.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Diba et al. (2018) yang membuktikan bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan melakukan pengolahan sumber daya alam atau potensi yang tepat melalui pajak dan retribusi daerah, sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Pengaruh Rasio Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil dari analisis deskriptif memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 17.97, nilai standar deviasi sebesar 7.74, nilai minimal sebesar 3.66, dan nilai maksimal sebesar 73.74. Nilai minimal berada di Kota Sukabumi pada tahun 2018, dan nilai maksimal berada di Kota Cimahi pada tahun 2017.

Pengaruh rasio belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki nilai koefisien sebesar -0.02, dengan *p-value* sebesar 0.07. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada taraf 0.05 terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020.

Hasil tersebut membuktikan bahwa, jika rasio belanja modal mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar 0.02 dengan asumsi variabel independen yang lain tidak mengalami penurunan atau bersifat konstan. Penyebab rasio belanja modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan karena kurang optimal dalam pengalokasian dana.

Faktor yang digunakan untuk mendukung kesesuaian dan penganggaran (Karlinda dkk, 2015) yaitu :

- 1) Sistem teknologi informasi yang dikembangkan guna mendukung atau berkontribusi dalam kesesuaian perencanaan penganggaran di dua daerah. Sistem ini akan

menyesuaikan program serta kegiatannya dengan anggaran, setelah program dan kegiatannya telah dilakukan.

2) Peran strategis yang didukung oleh Bappeda dapat menciptakan keberhasilan dari perencanaan dan penganggaran daerah. Bappeda juga memiliki kedudukan dalam mengawasi penganggaran dari masing-masing dinas sektoral.

3) Terdapat *political will* dari Pemerintah Daerah sehingga menciptakan komitmen Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem perencanaan yang terintegrasi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Wardani (2018), mengatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Hal itu terbukti dari nilai t -hitung $< t$ -tabel, yaitu $0.935 < 1.983$. Sedangkan nilai signifikansi sebesar $0.352 > 0.05$. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian I. Sari & Supadmi (2016), mengatakan bahwa belanja modal memiliki pengaruh dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, karena belanja modal telah dialokasikan dengan tepat sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

Pengaruh Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil dari analisis deskriptif memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 8.49, nilai standar deviasi sebesar 2.96, nilai minimal sebesar 2.07, dan nilai maksimal sebesar 15.6. Nilai minimal berada di Kota Depok pada tahun 2019, dan nilai maksimal berada di Kota Tasikmalaya pada tahun 2016.

Pengaruh kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia juga memiliki nilai koefisien sebesar -0.74, dengan *p-value* sebesar 0.00. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa variabel rasio kemandirian daerah berpengaruh negatif dan signifikan pada taraf 0.05 terhadap variabel Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat periode 2016 – 2020.

Hasil tersebut membuktikan bahwa, jika kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 1% maka Indeks Pembangunan Manusia akan mengalami penurunan sebesar 0.74 dengan asumsi variabel independen yang lain tidak mengalami penurunan atau bersifat konstan. Penyebab angka kemiskinan menurun, karena adanya peningkatan kualitas dari pembangunan manusia seperti investasi pemerintah di dalam sektor pendidikan dan kesehatan.

Dikutip dari *website* DJPB Kementerian Keuangan (2021), mengatakan bahwa Provinsi Jawa Barat menjelaskan hubungan sebab-akibat antara kebijakan fiskal dengan indeks perekonomian, serta menetapkan besarnya pengaruh APBN/APBD/Transfer Daerah atas pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, termasuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat dalam strategi pemulihan ekonomi nasional dan tingkat kemiskinan di Jawa Barat sebagai penyelesaian dari dampak pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Firmansah (2015), mengatakan bahwa variabel kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Namun hal ini bertolak belakang dengan penelitian Diba et al. (2018), mengatakan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh negatif dan signifikan dengan elastisitas negatif sebesar 0.045 terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Peneliti berharap agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran untuk meminimalisir angka kemiskinan.

KESIMPULAN

Rasio kemandirian daerah positif dan signifikan merupakan pemrediksi indeks pembangunan manusia. Sedangkan variabel rasio belanja modal dan kemiskinan memiliki nilai negatif tidak signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sehingga bisa disimpulkan dari penelitian ini

bahwa rasio belanja modal dan kemiskinan bukan merupakan pemrediksi yang tepat untuk indeks pembangunan manusia.

Implikasi

Pada variabel rasio kemandirian daerah, diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia agar rasio kemandirian daerah dapat dioptimalkan, sehingga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat dapat terjamin dan pertanggungjawaban dalam keuangan daerah bisa lebih baik lagi. Pada variabel rasio belanja modal, diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia agar rasio belanja modal dapat dioptimalkan dalam hal pengalokasian dana belanja daerah dan dilakukan evaluasi. Sehingga dana tersebut bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh instansi Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Pada variabel kemiskinan, diharapkan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia agar angka kemiskinan dapat diminimalisir khususnya pada saat Covid-19, yang dimana banyak pegawai di PHK dan tidak memiliki pekerjaan lagi sehingga kebutuhan hidupnya tidak dapat dipenuhi secara wajar. Angka kemiskinan bisa diminimalisir apabila dalam pengalokasian belanja modal tepat sasaran pada daerah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi, sehingga tercapainya pembangunan yang merata.

Diharapkan untuk peneliti selanjutnya dengan pembahasan yang sama, dapat menambah variabel independen lain atau variabel moderasi yang dapat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda agar hasilnya menjadi lebih komprehensif atau lebih luas.

REFERENSI

- Arwani, A., Ramadhan, M. N., & Restiara, V. (2020). *KEPEMILIKAN MANAJERIAL DALAM AGENCY THEORY*.
- BPK-RI, Dh.-B. (2003). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003*. 1, 1–40.
- BPS. (2021). *Indeks Pembangunan Manusia*. Website. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>
- BPS Provinsi Jawa Barat. (2021). *Kemiskinan*. <https://jabar.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html#subjekViewTab1>
- Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2016). *APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. Website. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2017). *APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. Website. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2018). *APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. Website. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2019). *APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. Website. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Daerah Subdit Data Keuangan, E. D. dan I. S. (2020). *APBD, Realisasi APBD, dan Neraca*. Website. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Dewi, S. S. (2019). *Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Pengangguran Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2015*.

Universitas Muhammadiyah.

- Diba, A. F. O., Fathorrazi, M., & Somaji, R. P. (2018). Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Ekuilibrium*, 2(1), 10–19.
- Digdowiseiso, K. (2015). *Sistem Keuangan Publik*. LPU-UNAS.
- DJPB Kementerian Keuangan. (2021). *Kajian Fiskal Regional (KFR) Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2021*. Website. <http://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/jabar/id/data-publikasi/kajian-fiskal-regional/3078-kajian-fiskal-regional-kfr-kanwil-djpb-provinsi-jawa-barat-triwulan-iii-tahun-2021.html>
- Firmansah, N. (2015). *Pengaruh Dana Perimbangan, Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kemiskinan Terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten*. UII Yogyakarta.
- Fitri, A. (2021). *Pengaruh Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Barat Periode: 2015-2019* (p. 114).
- Hanif, M. I. (2018). *Analisis Pengaruh Rasio Kemandirian dan Rasio Efektivitas Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2017)*.
- Hendri, Z., & Yafiza, M. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(1), 56-66. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i1.216>
- Karlinda, E., Rheza, B., Damanik, M. I., Agustine, T. E., & Sianturi, M. N. (2015). *Optimalisasi Fiskal bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Peran Belanja Operasional dan Belanja Modal dalam APBD*.
- Keuangan, D. J. P. (2020). *Apakah yang dimaksud dengan belanja modal?* http://www.djpk.kemenkeu.go.id/?epkb_post_type_1=apakah-yang-dimaksud-dengan-belanja-modal
- Mauludin, W., & Dewi, R. M. (2020). Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Banten. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 8(3), 116–121.
- Sari, I., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Pada Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 15(3), 2409–2438.
- Tarumingkeng, W. A., Rumat, V. A., & Rotinsulu, T. O. (2021). Pengaruh Belanja Modal dan Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(2), 82–95.
- Wardani, N. K. (2018). *Pengaruh Aset Daerah, PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2016)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Profil Penulis

¹Kumba Digdowiseiso adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional di tingkat sarjana. Kumba Digdowiseiso dapat dihubungi melalui: kumba.digdo@civitas.unas.ac.id

²Novia Nur Damayanti adalah mahasiswi angkatan 2018 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nasional dengan mengambil konsentrasi bidang Akuntansi Sektor Publik. Nova Nur Damayanti dapat dihubungi melalui: novianurdamayanti8@gmail.com

How to cite this Article

Digdowiseiso, K., & Damayanti, N.N (2021). Faktor-faktor Penentu Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 183-196